

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan anugerahNya kita dalam keadaan sehat melaksanakan tugas sekaligus memampukan kami dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 - 2021. Rencana Strategis ini disusun sebagai penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Humbang Hasundutan yakni **“MEWUJUDKAN HUMBANG HASUNDUTAN YANG HEBAT DAN BERMENTALITAS UNGGUL”** dengan fokus utama penyajian Aspek Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebuah komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dinas dalam memberikan pelayanan berkualitas terhadap masyarakat di Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Penyusunan Renstra ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Renstra ini merumuskan Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan dan langkah-langkah capaian kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya mendukung visi dan misi kabupaten dalam membangun Kabupaten Humbang Hasundutan lima tahun ke depan.

Disadari bahwa dokumen ini belum memenuhi harapan karena itu masukan dan saran guna penyempurnaan akan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan keterbatasan tersebut, kami berharap Renstra Tahun 2016-2021 ini dapat menjadi salah satu pedoman dalam pengembangan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan secara khusus dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan secara umum.

Doloksanggul, Agustus 2018

Plt. **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**



**Drs. RIKKY HILMAN SIHITE
PEMBINA TK. I
NIP. 19661224 198603 1 002**



DAFTAR ISI

Kata Pengantar		Hal.
Daftar Isi	i
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang.....	3
	1.2. Landasan Hukum.....	4
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
	1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN OPD	
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	8
	2.2. Sumber Daya SKPD.....	11
	2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	13
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD....	16
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	18
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	19
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi.....	19
	3.4. Telaahan RTRW dan KLHS.....	20
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	20
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
	4.1. Visi dan Misi SKPD	22
	4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	23
	4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD	26
BAB V	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
	5.1. Strategi dan Kebijakan SKPD	29
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
	6.1. Indikator Kinerja Dinas	39
BAB VII	PENUTUP	41



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (*selanjutnya disingkat Satpol PP*) Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan. Seiring dengan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam tahap perencanaan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyiapkan Rencana Strategis (*selanjutnya disingkat Renstra*) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selanjutnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah juga mengamanatkan bahwa Renstra SKPD merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah dan menyatakan bahwa Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan.

Sekaitan dengan uraian tersebut diatas Satpol PP sebagai salah satu organisasi perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kebijakan yang dilakukan adalah menyusun perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan bahwa Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan teknis dan



administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan maka disusunlah Renstra Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan 2016-2021 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan 2016-2021.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Perencanaan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2006-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;



10. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 disusun sebagai pedoman bagi Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menentukan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi serta sebagai implementasi dalam mewujudkan visi dan misi Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan 2016-2021 dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan:

1. Menyediakan acuan resmi bagi Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Menyediakan tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dievaluasi dengan hasil yang optimal;
3. Memberikan gambaran Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga didapatkan pemahaman yang komprehensif dan searah dengan pembangunan daerah;
4. Membantu Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan untuk memahami dan menilai pelaksanaan kegiatan yang berlangsung selama lima tahun ke depan;

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD dan keterkaitannya dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi;



- 1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD;
- 1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra SKPD;
- 1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dan penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis isi dokumen.

BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD

Mengemukakan secara ringkas Dasar Hukum Pembentukan Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD;
Menguraikan secara ringkas uraian tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan mulai dari Kepala Satpol PP sampai eselon struktural terbawah. Hal ini ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah organisasi dan tata laksana Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 2.2. Sumber Daya SKPD
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan anggaran;
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Menguraikan secara ringkas fungsi dan uraian tugas masing-masing pejabat struktural, meliputi Kepala, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian yang menjadi pembantunya dan Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang menjadi pembantunya;
- 2.4. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Satpol PP
Mengemukakan analisa tentang tantangan dan peluang berupa analisis kelemahan, ancaman, peluang dan kekuatan yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan.

BAB III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Mengemukakan secara ringkas Dasar Hukum Pembentukan Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisis gambaran pelayanan;

- 3.2. Telaahan Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah
Uraian tentang keselarasan dan keterkaitan Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan penyelenggaraan tugas Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan;
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Satpol PP Provinsi
Uraian tentang keselarasan dan keterkaitan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Renstra Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dengan penyelenggaraan tugas Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan;
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
Uraian tentang penyempurnaan penyelenggaraan tugas Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan seiring dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan 2016-2021;
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Uraian tentang telaahan kembali faktor-faktor pelayanan Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan demikian diperoleh isu-isu strategis yang akan ditangani.

BAB IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, serta Strategi dan Kebijakan

- 4.1. Visi dan Misi Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan;
- 4.2. Tujuan dan Sasaran jangka menengah Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan;
- 4.3. Strategi dan Kebijakan Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VI : Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII : Penutup

Uraian singkat sebagai pernyataan penutup tentang muatan Renstra Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 37 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan. Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan perangkat daerah sebagai pembantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran.

2.1. Tugas, dan Fungsi serta Susunan Organisasi Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan

Adapun tugas Satpol PP adalah sebagai penegak Produk Hukum Daerah, memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, pencegahan dan pemadaman kebakaran. Satpol PP dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan dan pelaksanaan Renstra Satpol PP;
- b. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satpol PP;
- c. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP;
- d. perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. penyelenggaraan pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- h. penanganan gangguan keamanan daerah;
- i. penegakan Produk hukum daerah dan Peraturan Bupati;
- j. pembinaan PPNS;
- k. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran;
- l. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggota Satpol PP, masyarakat dan dunia usaha terhadap bahaya/gangguan keamanan, ketentraman, ketertiban dan bahaya kebakaran;



- m. pelaksanaan pemadaman kebakaran;
- n. pelaksanaan pencarian dan penyelamatan serta evakuasi manusia, harta benda dan makhluk hidup lainnya dari kejadian kebakaran;
- o. pelayanan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- p. pelayanan investigasi kejadian kebakaran;
- q. pelayanan penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun;
- r. pelaksanaan kegiatan deteksi dini bahaya kebakaran;
- s. pelaksanaan pengkoordinasian dengan kepolisian, TNI, dan aparat penegak hukum lainnya dalam hal penegakan Produk hukum daerah, ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
- t. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- u. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- v. pengelolaan prasarana dan sarana Satpol PP, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran;
- w. pengembangan kapasitas petugas pemadam kebakaran, anggota Satpol PP;
- x. pengelolaan kepegawaian pada Satpol PP;
- y. pengelolaan keuangan Satpol PP;
- z. pengelolaan ketatausahaan Satpol PP;
- aa. pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Satpol PP;
- bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
- cc. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.

Sebagaimana diuraikan dalam pasal 3 Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 37 Tahun 2016 tentang 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan, Susunan Organisasi Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan diuraikan sebagai berikut:

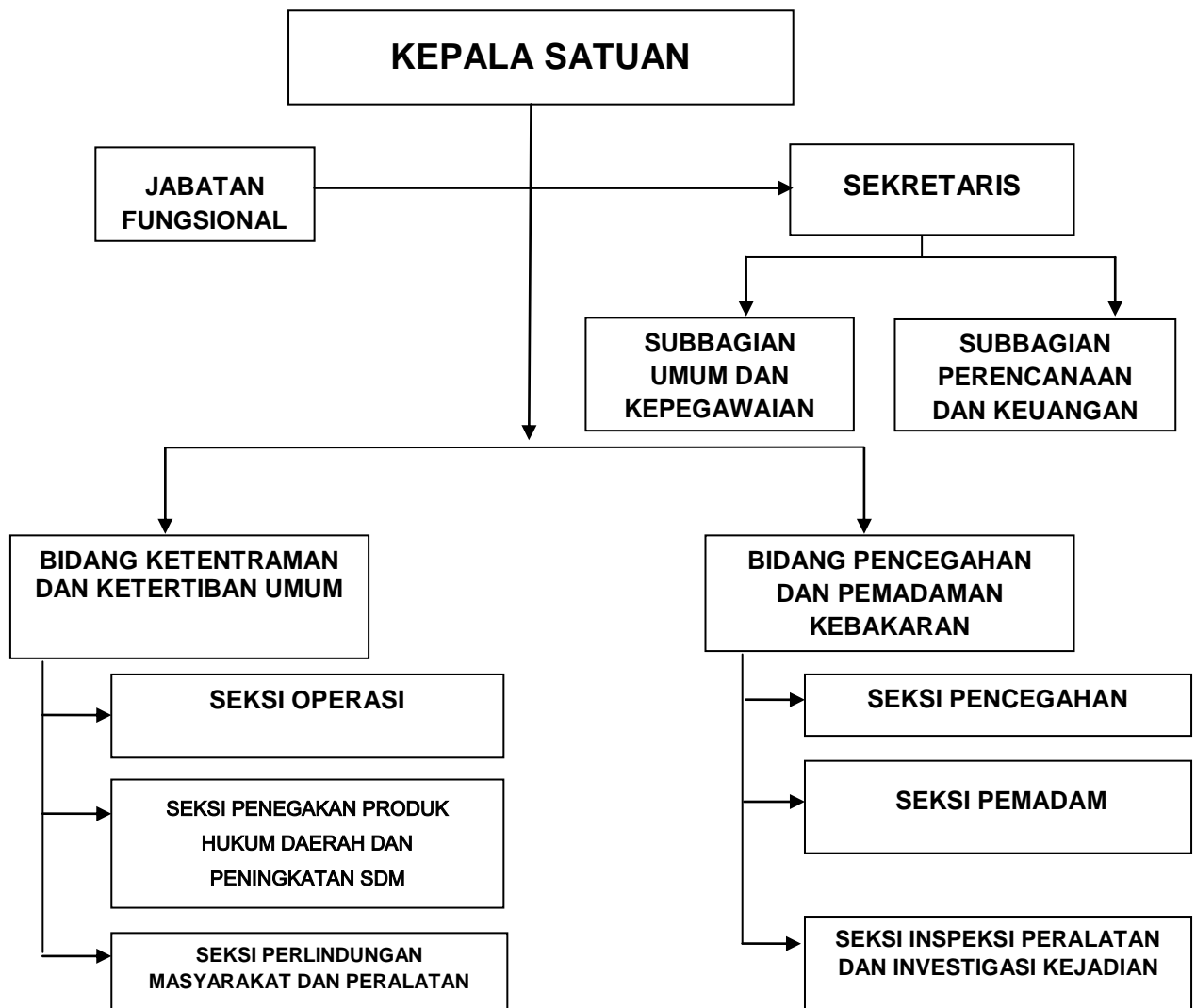
- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.



- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari:
1. Seksi Operasi;
 2. Seksi Penegak Produk Hukum Daerah dan Peningkatan SDM;
 3. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Perlengkapan.
- d. Bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran, terdiri dari:
1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Pemadam;
 3. Seksi Inspeksi Peralatan dan Investigasi Kejadian.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki struktur organisasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 37 Tahun 2016:

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



2.2. Sumber Daya Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan memerlukan sumber daya aparatur yang mampu mengelola jalannya administrasi maupun kegiatan kantor yang meliputi ketenagaan, sarana dan prasarana, serta keuangan yang memadai. Sumber daya yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :

2.2.1 Ketenagaan

Dalam melaksanakan pelayanan tersebut di atas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan didukung oleh 214 (dua ratus empat belas) orang pegawai negeri sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Satuan : 1 orang
2. Sekretaris : 1 orang
3. Kepala Bidang : 2 orang
4. Kepala Sub Bagian : 2 orang
5. Kepala Seksi : 6 orang
6. Staf : 22 orang
7. Tenaga Kontrak : 180 orang

Untuk mengetahui gambaran komposisi aparatur menurut tingkat pendidikan dan golongan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
1	SLTP	4	orang
2	SLTA	17	orang
3	D-3	1	orang
4	Sarjana S-1	10	orang
5	Master S-2	2	orang
Jumlah		34	orang

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2017



b. Berdasarkan Golongan

	Golongan	Jumlah	
	I	4	orang
	II	18	orang
	III	9	orang
	IV	3	orang
	Jumlah	34	orang

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2017

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Berikut ini data sarana dan prasarana yang mendukung program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017:

No	Nama Barang	Jumlah		Ket.
1	Terminal Damkar	1	Unit	Bangunan Pengadaan TA. 2016
2	Mobil Patwal	1	Unit	Baik
3	Sepeda Motor	2	Unit	Baik
4	Mobil Damkar	4	Unit	2 (dua) Baik, 2 (dua) rusak
5	Filling Besi	2	Buah	Kurang baik
6	Genset	1	Unit	Rusak
7	Lemari Kayu	4	Buah	Baik
8	Loker P2K	3	Buah	Baik
9	Kursi Putar	2	Buah	1 baik, 1 rusak
10	Kursi Kerja	9	Buah	Baik
11	Meja ½ Biro	8	Buah	Rusak ringan
12	Komputer	2	Unit	Baik
13	Laptop	2	Unit	Baik
14	Printer	2	Buah	Baik
15	Telepon	1	Buah	Baik
16	Televisi	1	Buah	Baik
17	Tempat Tidur	10	Buah	Baik
18	Kasur Busa	8	Buah	Baik

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2017



2.2.3. Kondisi Keuangan

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan, Satuan Polisi Pamong Praja selama Tahun Anggaran 2017-2021 telah merencanakan anggaran sebagai berikut :

No.	Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	2017	7.346.111.832,00	
2.	2018	16.419.651.167,00	
3.	2019	18.370.885.768,00	
4.	2020	20.903.667.644,00	
5.	2021	23.459.150.371,00	

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.1. Kepala Satuan

Kepala Satpol PP mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan kelompok jabatan fungsional;
- c. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.

2.3.2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas:

- (1) Sekretaris merupakan unit kerja Satpol PP sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan;
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



- a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Satpol PP sesuai lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan DPA Satpol PP;
- c. pengkoordinasian penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Satpol PP;
- d. pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran Satpol PP;
- e. pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satpol PP;
- f. pengelolaan kepegawaian Satpol PP;
- g. pengelolaan keuangan Satpol PP;
- h. pengelolaan ketatausahaan Satpol PP;
- i. pengelolaan kerumahtanggaan Satpol PP;
- j. pengelolaan perlengkapan Satpol PP;
- k. pengelolaan dokumentasi dan arsip Satpol PP;
- l. pengkoordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Kasat Pol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

2.3.3. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- (1) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan unit kerja Satpol PP sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Satpol PP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan DPA Satpol PP sesuai dengan lingkup tugasnya;



- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. penyelenggaraan pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- f. penanganan gangguan keamanan Daerah;
- g. penegakan produk hukum daerah dan peraturan bupati;
- h. pembinaan PPNS;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- j. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- k. pengelolaan prasarana dan sarana Satpol PP, dan perlindungan masyarakat;
- l. pengembangan kapasitas anggota Satpol PP;
- m. penyusunan peta potensi gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2.3.4. Bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran

- (1) Bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran merupakan unit kerja Satpol PP sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pencegahan dan pemadaman kebakaran yang dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan;
- (2) Bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan Renstra, RKA serta DPA Satpol PP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan DPA Satpol PP sesuai dengan lingkup tugasnya;



- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran;
- d. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia petugas pemadam kebakaran, masyarakat dan dunia usaha terhadap bahaya/gangguan bahaya kebakaran;
- e. pelaksanaan pemadaman kebakaran;
- f. pelaksanaan pencarian dan penyelamatan serta evakuasi manusia, harta benda dan makhluk hidup lainnya dari kejadian kebakaran;
- g. pelayanan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- h. pelayanan investigasi kejadian kebakaran;
- i. pelayanan penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun;
- j. pelaksanaan kegiatan deteksi dini bahaya kebakaran;
- k. pelaksanaan pengordinasian kejadian kebakaran dengan kepolisian, TNI, dan aparat penegak hukum lainnya sesuai kebutuhan;
- l. pengelolaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran;
- m. penyusunan peta potensi rawan kebakaran;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran.

2.4. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan

Hal tersebut bisa berasal dari internal organisasi dan juga berasal dari eksternal organisasi. Identifikasi dari peluang dan tantangan yang tepat dan terukur bisa memperkuat organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Peluang Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Kelembagaan Satpol PP Kabupaten Humbang yang sudah mencapai Eselon II;
2. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat akan rasa nyaman;
3. Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai salah satu pelayanan dasar yang bersifat wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



4. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 yang memperkuat kedudukan Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai penyelenggara di daerah;
5. Dorongan yang kuat dari diri aparaturnya untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam bekerja;
6. Demografi penduduk dan nilai kearifan lokal yang memungkinkan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam membantu penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
7. Terbukanya akses kerjasama terpadu antara Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan dengan instansi baik vertikal maupun horizontal untuk peningkatan penyelenggaraan tugas;
8. Adanya produk hukum daerah yang menjamin pelaksanaan tugas-tugas Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan dalam pelaksanaan operasi lapangan.

Tantangan Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan adalah:

1. Terbatasnya sumber daya manusia; dengan besarnya beban kerja maka Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan masih kekurangan staf, belum memiliki pejabat fungsional Polisi Pamong Praja, belum memiliki PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan belum memiliki satuan linmas yang bertugas dalam upaya perlindungan masyarakat;
2. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang memayungi pelaksanaan tugas Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Belum adanya Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan SOP (*Standar Operational Procedur*) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan;
4. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas;
5. Cakupan luas wilayah kerja yang belum sepadan dengan jumlah personil dan sarana prasarana operasional;
6. Cakupan demografi yang besar yang belum sepadan dengan jumlah personil;
7. Keterbatasan anggaran.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi didalam proses pelaksanaan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan penegakan produk hukum daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis. Dari permasalahan tersebut akhirnya dapat disusun visi dan misi dari Renstra Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan. Perumusan isu strategis tersebut dilakukan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan merumuskan identifikasi masalah umum yang tepat dan strategis dengan gambaran sebagai berikut:

3.1.1. Kelemahan Internal

1. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Personil yang mengikuti Pendidikan Polisi Pamong Praja belum ada;
3. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang memayungi pelaksanaan tugas Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan;
4. Belum adanya Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan SOP (*Standar Operational Procedur*) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan
5. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas;
6. Cakupan luas wilayah kerja yang belum sepadan dengan jumlah personil dan sarana prasarana operasional;
7. Cakupan demografi yang besar yang belum sepadan dengan jumlah personil;
8. Keterbatasan anggaran.

3.1.2. Ancaman External

1. Kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah/Keputusan Bupati masih kurang;
2. Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai bagian dari Pengembangan Pariwisata Danau Toba oleh Badan Otorita Danau Toba membuka pintu masuk kedatangan



wisatawan, pertumbuhan ekonomi dan perubahan tatanan kehidupan masyarakat daerah wisata menuntut peningkatan penyelenggaraan tugas Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan;

3. Kota Doloksanggul sebagai Ibu Kota Kabupaten yang pertumbuhannya mulai naik, diikuti dengan perkembangan produk hukum daerah dan transaksi jual beli oleh pendatang dari luar daerah yang cukup tinggi mengakibatkan penggunaan kaki lima yang sulit dikendalikan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan terpilih, telah menyusun visi dan misi Kabupaten Humbang Hasundutan untuk meningkatkan pembangunan di masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan. Visinya adalah Humbang Hasundutan Hebat dan Bermentalitas Unggul, dengan penjabaran misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Iman dan Taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
4. Meningkatkan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Kerakyatan yang Baik
5. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai Pembantu Bupati di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat masuk ke dalam Misi Nomor 3 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi

Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai institusi pemerintah daerah berada di Lingkup Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri). Panduan bagi unit penyelenggara unit organisasi di bawah Kemendagri tertuang dalam renstra yang dibuat oleh Kemendagri Tahun 2014-2019. Dalam renstra tersebut, visi dan misi diuraikan sebagai berikut:

- Visi** : Kementerian Dalam Negeri menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik dalam Negeri, Meningkatkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa
- Misi ke-2** : Mewujudkan Efektivitas Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Umum melalui Harmonisasi Hubungan Pusat-Daerah, **Menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** serta Meningkatkan Pendayagunaan Administrasi



Kependudukan.

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

Mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 bahwa Kabupaten Humbang Hasundutan diarahkan menjadi 4 (empat) pusat pelayanan, yaitu:

1. Pusat Kegiatan Lokal Promosi, mencakup kawasan yang berada di Lintongnihuta;
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), mencakup Doloksanggul;
3. Pusat Pelayanan Kawasan, mencakup Lintongnihuta, Pakkat, Parlilitan dan Baktiraja;
4. Pusat pelayanan Lingkungan (PPL) mencakup Pusat Permukiman Paranginan, Pollung, Onanganjang, Sijamapolang dan Tarbintang.

Masih dengan sumber data yang sama bahwa Kabupaten Humbang Hasundutan secara kajian KHLS Kabupaten Humbang Hasundutan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kawasan Strategis Nasional, meliputi Kecamatan Paranginan , Lintongnihuta, Doloksanggul, Baktiraja dan Pollung (Kawasan di sekitar Danau Toba);
2. Kawasan Strategis Provinsi yang diperuntukkan kepada pengembangan kawasan agropolitan dataran tinggi, pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi;
3. Kawasan Strategis Kabupaten yang difokuskan kepada pengembangan aspek ekonomi, sosial dan budaya dengan pusat pengembangan di Kecamatan Doloksanggul, Baktiraja, Lintongnihuta, Paranginan, Pollung dan Parlilitan.

Sesuai dengan rencana yang tercantum pada RPJM-D Tahun 2016-2021 maka Kabupaten Humbang Hasundutan akan diproyeksikan menjadi pusat pengembangan kawasan, pusat kegiatan dan pusat layanan. Perubahan wajah Kabupaten Humbang Hasundutan sekaitan dengan pengembangan dimaksud mendorong perubahan tata hidup (peradaban) yang cenderung mengikuti *trend* pengembangan kawasannya. Perubahan ini menjadi ancaman (*threat*) bagi Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan. Sejalan dengan rencana pengembangan ini, maka Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan mengikutinya dengan penguatan kapasitas kelembagaan, guna mendukung penyelenggaraan yang menjadi urusannya di wilayah tersebut.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

- a. Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban di masyarakat yang mendorong untuk tertib hukum, tertib sosial, tertib lingkungan serta



partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran yang mandiri di wilayahnya masing-masing;

- b. Terwujudnya Pol PP dan PPNS yang handal dalam pelaksanaan tugas;
- c. Terwujudnya pengamanan di rumah dinas pimpinan daerah dan objek vital milik pemerintah daerah guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pimpinan daerah, pimpinan nasional, pejabat pusat dan tamu negara;
- d. Terwujudnya sistem koordinasi Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan dengan aparat penegak hukum lainnya dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan produk hukum daerah;
- e. Adanya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pemicu terjadinya kebakaran serta tindakan mengatasi kebakaran
- f. Terwujudnya SDM petugas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran yang siap siaga dan terampil
- g. Tersedianya Pos WMK, sarana dan prasarana, peralatan dan perlengkapan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran yang memadai



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan

Visi Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan cita-cita dan gambaran yang ingin diwujudkan secara konsisten. Dalam merumuskan visi, Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan tetap bertolak dari cita-cita dan gambaran yang ingin diwujudkan oleh Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai pembantunya dalam mewujudkan Humbang Hasundutan Hebat dan Bermentalitas Unggul. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana dalam rumusan misinya yang ke-3, melaksanakan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya bertolak ukur dari pelayanan dasar pemerintahan dalam negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota. Sejalan dengan Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 bahwa jenis pelayanan dasar pemerintahan yang berkaitan dengan tugas Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan yang dikuatkan dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 37 Tahun 2016 adalah pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran.

Uraian tersebut diatas menempatkan Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan menduduki posisi yang sangat menentukan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Dengan ini, Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan berkomitmen untuk mewujudkan 3 (tiga) kata kunci:

1. **Tenteram;** semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan Perda dan Perkada yang berkeadilan;
2. **Tertib;** semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada;
3. **Terlindungi;** semakin meningkatnya kesiapan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan serta mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran melalui kolaborasi antara aparat hukum lainnya dan pemberdayaan masyarakat.

Keluaran dari perwujudan 3 (tiga) kata kunci diatas, Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan berharap dengan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan Masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan akan merasakan kenyamanan hidup sebagaimana dirumuskan dalam Visi Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 yakni:

Mewujudkan Masyarakat Humbang Hasundutan yang Nyaman



Dengan menetapkan visi, Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan menguraikan langkah strategis untuk mewujudkan visinya, sebagaimana dirumuskan dalam misi Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya-upaya penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang berkualitas dengan mengedepankan prinsip humanis oleh Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan tindakan pencegahan bahaya kebakaran;
3. Menjalin kemitraan dengan aparat hukum lainnya dan meningkatkan koordinasi dengan SKPD lainnya termasuk para camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan serta memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan;
4. Meningkatkan kelembagaan dan penyusunan Ranperda menyangkut tugas dan fungsi, Petunjuk Teknis dan Standard Operational Procedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta optimalisasi dan peningkatan fasilitas penunjang tugas dan fungsi secara berjenjang dan berkesinambungan di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan;

4.2. Tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan

4.2.1. Tujuan dan Sasaran

Dari visi dan misi yang telah diuraikan diatas sebagai pengembangannya maka setiap misi yang akan dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki tujuan yang secara umum mengarah kepada visi yang ingin dicapai. Oleh karenanya dalam setiap misi memiliki tujuan sebagai berikut:

Misi ke-1 : Meningkatkan upaya-upaya penyelenggaraan dan penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang berkualitas dengan mengedepankan prinsip humanis oleh Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan;

Tujuan : Terwujudnya kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindungi,



masyarakat yang sadar dan taat hukum dan kenyamanan pejabat pemerintah, tamu pemerintah dan wisatawan;

Misi ke-2 : Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan tindakan pencegahan bahaya kebakaran;

Tujuan : Melindungi masyarakat dari bahaya dan akibat kebakaran dan menurunkan angka kejadian kebakaran.

Misi ke-3 : Menjalinkan kemitraan dengan aparat hukum lainnya dan meningkatkan koordinasi dengan SKPD lainnya termasuk para camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan serta memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan;

Tujuan : Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang simultan dan koordinatif sesuai tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan.

Misi ke-4 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan penyusunan Ranperda menyangkut tugas dan fungsi, Petunjuk Teknis dan Standard Operational Procedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan;

Tujuan : Meningkatnya kekuatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan terlaksananya amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 serta tersusunnya prosedur operasional kegiatan Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan guna meminimalisir pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang di lapangan.

Misi ke-5 : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran, optimalisasi dan peningkatan perlengkapan/peralatan gedung kantor secara berjenjang dan berkesinambungan di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan;

Tujuan : Memberikan dukungan kelembagaan, sarana dan prasarana yang optimal dalam pelaksanaan tugas.



4.2.2. Sasaran

Sasaran Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan uraian visi, misi dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan sasaran yang diuraikan sebagai berikut:

1. Masyarakat Humbang Hasundutan yang tenteram, tertib dan terlindungi;
2. Kenyamanan Pejabat Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
3. Kenyamanan tamu pemerintah dan wisatawan berkegiatan sesuai tujuan kedatangannya ke Kabupaten Humbang Hasundutan;
4. Masyarakat Humbang Hasundutan terlindungi dari ancaman dan bahaya kebakaran;
5. Kesatuan gerak para penyelenggara urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat baik secara horizontal maupun vertikal;
6. Masyarakat Humbang Hasundutan berperan serta dan terlibat dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
7. Kekuatan kelembagaan Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan;
8. Kesiapsiagaan aparaturnya dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.



4.3. Strategi dan Kebijakan Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan

Uraian Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>Misi ke-1 Meningkatkan upaya-upaya penyelenggaraan dan penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang berkualitas dengan mengedepankan prinsip humanis oleh Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan</p>	<p>Terwujudnya kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindungi, masyarakat yang sadar dan taat hukum dan kenyamanan pejabat pemerintah, tamu pemerintah dan wisatawan</p>	<p>Cakupan Patroli Siaga</p>	<p>Mewujudkan penyelenggaraan pengamanan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan patroli siaga ketenteraman dan ketertiban umum 2. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan tamu daerah 3. Melaksanakan pengamanan aset-aset penting daerah 4. Melaksanakan penegakan produk hukum daerah 5. Melaksanakan Penertiban PNS dan Pelajar
<p>Misi ke-2 Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan tindakan pencegahan bahaya kebakaran</p>	<p>Melindungi masyarakat dari bahaya dan akibat kebakaran dan menurunkan angka kejadian kebakaran</p>	<p>Jumlah peristiwa kebakaran yang ditangani</p> <p>Penurunan jumlah peristiwa kebakaran</p>	<p>Meningkatkan waktu tanggap dalam menangani peristiwa kebakaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelayanan pemadaman kebakaran dan investigasi kejadian 2. Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 3. Melaksanakan pemetaan daerah rawan kebakaran 4. Fasilitasi pencegahan bahaya kebakaran



<p>Misi ke-3</p> <p>Menjalin kemitraan dengan aparat hukum lainnya dan meningkatkan koordinasi dengan SKPD lainnya termasuk para camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan serta memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan</p>	<p>Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang simultan dan koordinatif sesuai tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan</p>	<p>Cakupan Penegakan Perda</p> <p>Jumlah Anggota Linmas terlatih</p> <p>Jumlah Balakar terlatih</p> <p>Jumlah Pos siskamling</p>	<p>Menjalin kemitraan dengan aparat hukum lainnya</p> <p>Menjalin koordinasi dengan SKPD lainnya</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Operasi Terpadu dengan aparat hukum (Polisi, TNI, Kejaksaan) dalam pemberantasan penyakit masyarakat 2. Melaksanakan kerjasama dengan Dinas Sosial Patroli Orang Gila dan Gelandangan 3. Pembentukan dan Pelatihan Anggota Linmas 4. Mendirikan Pos Siskamling 5. Pembentukan dan Pelatihan Bantuan Relawan Kebakaran
<p>Misi ke-4</p> <p>Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan penyusunan Ranperda menyangkut tugas dan fungsi, Petunjuk Teknis dan Standard Operational Procedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan</p>	<p>Meningkatnya kekuatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan terlaksananya amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 serta tersusunnya prosedur operasional kegiatan Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan guna meminimalisir</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah anggota Satpol PP terdidik dan terlatih 2. Jumlah anggota pemadam kebakaran terdidik dan terlatih 3. Jumlah sarana prasarana pendukung operasional lapangan yang 	<p>Meningkatkan kapasitas kelembagaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutmen Anggota Banpol PP 2. Rekrutmen Anggota Pemadam Kebakaran 3. Pendidikan dan Pelatihan Satpol PP di dalam/luar daerah 4. Pendidikan dan Pelatihan Anggota Pemadam Kebakaran 5. Pembinaan dan Pelatihan Banpol PP



	pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang di lapangan	kondisi baik dan terpakai 4. Jumlah Penjabat Fungsional Pol PP 5. Jumlah Penjabat Fungsional PPNS 6. Jumlah Pos WMK		6. Diklat PPNS 7. Pengadaan Peralatan /Perlengkapan Kerja Satpol PP 8. Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kerja Pemadam Kebakaran 9. Pengadaan Pos WMK 10. Pengadaan Mobil Damkar 11. Penyusunan Ranperda Bidang Trantibum 12. Penyusunan SOP Satpol PP
Misi ke-5 Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran, optimalisasi dan peningkatan perlengkapan/peralatan gedung kantor secara berjenjang dan berkesinambungan di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan	Memberikan dukungan kelembagaan, sarana dan prasarana yang optimal dalam pelaksanaan tugas kantor	Sarana dan prasarana pendukung kinerja yang efektif	1. Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran yang baik 2. Menyediakan sarana dan prasarana kantor 3. Memelihara sarana dan prasarana kantor 4. Menyusun Dokumen Perencanaan 5. Menyusun Dokumen Laporan Penyelenggaraan	1. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran yang dibutuhkan 2. Penyediaan perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dibutuhkan 3. Penyediaan kebutuhan kerumahtangga kantor 4. Memelihara secara rutin/berkala kendaraan dinas operasional 5. Pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung kantor 6. Penyusunan dokumen perencanaan



				7. Penyusunan Laporan Penyelenggaran SKPD
--	--	--	--	---



BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

1. Program Kegiatan

Program kerja disusun untuk menyelesaikan isu-isu strategis dalam mewujudkan visi dan misi Satpol PP. Untuk jangka waktu 2016- 2021, program kerja dan kegiatan yang bersifat rutin (administrasi perkantoran) maupun kegiatan pada Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
7	Penyediaan Makanan dan Minuman
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9	Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
10	Penyediaan Jasa Administrasi dan Pelaporan Keuangan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
5	Pengadaan Perlengkapan Pos Jaga Satpol PP dan Mess Pemadam Kebakaran
6	Pengadaan Kendaraan Dinas Kasat Pol PP
7	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	
1	Pengadaan Gedung Baru Satpol PP

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Satpol PP dan Perlengkapannya
2	Pengadaan Pakaian Dinas Petugas Pemadam Kebakaran dan Perlengkapannya
3	Pengadaan Pakaian Latihan dan Kebugaran Fisik dan Perlengkapannya
4	Pengadaan Pakaian Anggota Linmas
5	Operasi Penertiban PNS dan Pelajar

5. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan	
1	Penyusunan Laporan Dokumen Perencanaan
2	Penyusunan Laporan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan



6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1	Pembinaan dan Pelatihan Banpol PP
2	Pelatihan Kebugaran Fisik, Kesamaptaan dan Beladiri
3	Pelatihan dan Simulasi Personil Pemadam Kebakaran
4	Diklat PPNS
5	Diklat Dasar Pol PP
6	Mengikuti HUT Linmas dan Satpol PP di Provinsi
7	Pembangunan Kartu Anggota Satpol PP

7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1	Operasional dan Peningkatan Kinerja Anggota Banpol PP
2	Operasi Penertiban dan Penegakan Produk Hukum Daerah
3	Operasi Patroli Pengawalan (Patwal)
4	Operasi Pengamanan Hari-hari Besar, Unjuk Rasa dan Kegiatan/Event tertentu
5	Piket Pengamanan Aset-aset Penting Daerah
5	Operasi Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
6	Rekrutmen Pegawai Kontrak Banpol PP
7	Pengadaan dan Pengurusan Ijin Senjata Api
8	Operasional Pengamanan Festival Danau Toba
9	Operasional Pengamanan Marathon Humbang Lake
10	Penyusunan Ranperda di Bidang Trantibum
11	Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Daerah di Bidang Trantibum
12	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Satpol PP

8. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

1	Operasi Terpadu Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
---	---

9. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perlindungan Masyarakat

1	Pembentukan dan Pelatihan Anggota Linmas
2	Pelatihan Bantuan Relawan Pemadam Kebakaran
3	Pembangunan Pos Siskamling

10. Program Pencegahan Dini dan Pemadaman Kebakaran

1	Operasional dan Peningkatan Kinerja Petugas Pemadam Kebakaran
2	Operasi Penanganan Bencana Kebakaran
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran
4	Pembangunan Pos Wilayah Manajemen Kebakaran
5	Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
6	Fasilitasi Pencegahan Dini Bahaya Kebakaran
7	Pembuatan Peta Daerah Rawan Kebakaran
8	Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran
9	Pembangunan Hydrant dan Bak Penampungan Air



10	Pengadaan Pompa Portable
11	Rekrutmen Petugas Pemadam Kebakaran

2. Indikator Kinerja

Indikator Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 ini adalah sesuai dengan kebijakan dan program dan matriks program tahunan pada Lampiran Renstra ini.

3. Pendanaan Indikatif

Pembiayaan dalam rencana strategis Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016-2021 direncanakan dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Humbang Hasundutan.

4. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 ini adalah sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum dan suasana kondusif bagi masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan.
- b. Terwujudnya penegakan Produk Hukum Daerah secara optimal;
- c. Terpenuhinya pelayanan prima dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran.



**RENCANA PROGRAM/KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Tolak		KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD TAHUN 2016 (Rp.000)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021		OPD Penanggung jawab
					2017		2018		2019		2020		2021				
		Tolak Ukur	Satuan		Target	PAGU (Rp. 000)	Target	PAGU (Rp. 000)	Target	PAGU (Rp. 000)	Target	PAGU (Rp. 000)	Target	PAGU (Rp. 000)	Target	PAGU (Rp. 000)	
Urusan Wajib																	
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																	
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																
1	Penyediaan Jasa Surat-menyurat		bln	0	12 bln	2.850		0		0		0		0	12 bln	2.850	SATPOL PP
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		bln	0	12 bln	33.842	12 bln	32.400	12 bln	37.260	12 bln	42.849	12 bln	49.276	60 bln	195.627	SATPOL PP
3	Penyediaan Bahan Bacaan, Peraturan dan Perundang-undangan		bln	0		0	12 bln	12.000	12 bln	13.800	12 bln	15.600	12 bln	17.400	48 bln	58.800	SATPOL PP
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		bln	0	12 bln	6.977	12 bln	12.952	12 bln	14.895	12 bln	17.129	12 bln	19.699	60 bln	71.653	SATPOL PP
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor		bln	0	12 bln	42.352	12 bln	48.479	12 bln	55.751	12 bln	64.114	12 bln	73.731	60 bln	28.428	SATPOL PP
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		bln	0	12 bln	33.846	12 bln	26.300	12 bln	30.245	12 bln	34.782	12 bln	39.999	60 bln	165.171	SATPOL PP



SATPOL PP KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bln	0	12 bln	9,375	12 bln	9.375.	12 bln	10.782	12 bln	12.399	12 bln	14.259	60 bln	56.189	SATPOL PP
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	bln	0	12 bln	80.236	12 bln	52.400	12 bln	60.260	12 bln	69.299	12 bln	79.694	60 bln	341.889	SATPOL PP
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bln	0	12 bln	239.778	12 bln	239.778	12 bln	275.745	12 bln	317.106	12 bln	364.672	60 bln	1.437.079	SATPOL PP
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	bln	0	12 bln	305.000	12 bln	303.610	12 bln	349.152	12 bln	401.524	12 bln	461.753	60 bln	1.821.039	SATPOL PP
11	Penyediaan Jasa Administrasi dan Pelaporan Keuangan	bln	0		0	12 bln	11.400	12 bln	13.110	12 bln	15.077	12 bln	17.338	48 bln	56.924.	SATPOL PP
12	Operasional Banpol PP dan Anggota Pemadam Kebakaran	bln	0		0	12 bln	3.931.200	12 bln	4.520.880	12 bln	5.199.012	12 bln	5.978.864	48 bln	19.629.956	SATPOL PP
13	Extrafooding Petugas Malam	bln	0		0	12 bln	436.200	12 bln	501.630	12 bln	576.875	12 bln	663.406	48 bln	2.178.110	SATPOL PP
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																
14	Pemeliharaan rutin/ Berkala Gedung Kantor	bln	0	12 bln	90.916	12 bln	20.000	12 bln	23.000	12 bln	26.450	12 bln	30.418	60 bln	190.784	SATPOL PP
15	Pemeliharaan rutin/ Berkala kendaraan dinas/ Operasional	bln	0	12 bln	550.000	12 bln	59.000	12 bln	67.850	12 bln	78.028	12 bln	89.732	60 bln	844.609	SATPOL PP
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	bln	0	12 bln	36.155	12 bln	5.000	12 bln	5.750	12 bln	6.613	12 bln	7.604	60 bln	61.122	SATPOL PP
17	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan gedung	paket	0	1 paket	250.000	1 paket	196.880	1 paket	226.412	1 paket	260.374	1 paket	299.430	5 paket	1.233.096	SATPOL PP



SATPOL PP KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

	Kantor																
18	Pengadaan Perlengkapan Mess Pemadam Kebakaran dan Pos Jaga Satpol PP		paket	49.825.	1 paket	110.000	1 paket	73.920	1 paket	85.008	1 paket	97.759	1 paket	112.423	5 paket	528.935	SATPOL PP
19	Pengadaan Kendaraan Dinas Kasat Pol PP		unit	0		0		0	1 unit	450.000		0		0	1 unit	450.000	SATPOL PP
20	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2		unit	0	2 unit	65.000	4 unit	150.000	2 unit	84.500	2 unit	97.175	2 unit	111.751	12 unit	508.426	SATPOL PP
C Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan																	
21	Pengadaan Gedung Baru Satpol PP		unit	0		0		0	1 unit	2.000.000		0		0	1 unit	2.000.000	SATPOL PP
D Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	
22	Pengadaan Pakaian Dinas Satpol PP dan Perlengkapan Satpol PP		stel	0	100 stel	323.217	64 stel	149.828	166 stel	371.699	166 stel	408.869	166 stel	449.756	662 stel	1.703.368	SATPOL PP
23	Pengadaan pakaian dinas/ perlengkapan petugas pemadam kebakaran		stel	118.398	60 stel	196.495	60 stel	182.401	60 stel	255.443	60 stel	293.760	60 stel	337.824	300 stel	1.384.321	SATPOL PP
24	Pengadaan Pakaian latihan dan perlengkapan peralatan pelatihan Kebugaran Fisik		paket	0	1 paket	87.650		0	1 paket	219.958	1 paket	252.952	1 paket	290.895	5 paket	851.455	SATPOL PP
25	Pengadaan Pakaian Anggota Linmas		set	0		0	308 stel	650.000		0	308 stel	845.000		0	616 stel	1.495.000	SATPOL PP
26	Operasi Penertiban PNS dan Pelajar		bulan	0		0	12 bln	108.640	12 bln	124.936	12 bln	143.676	12 bln	165.228	48 bln	542.480	SATPOL PP
E Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan																	
27	Penyusunan Laporan Dokumen Perencanaan		lap	0	5 Lap	29.910		0		0		0		0	5 Lap	29.910	SATPOL PP



SATPOL PP KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

28	Penyusunan Laporan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	lap	0	0	0	2 Lap	35.000	2 Lap	40.250	2 Lap	46.288	2 Lap	53.231	8 Lap	174.768	SATPOL PP
F Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
29	Pembinaan dan Pelatihan Banpol PP	org	0	100 org	91.800	0	0	0	0	0	0	0	0	100 org	91.800	SATPOL PP
30	Pelatihan Kebugaran fisik, kesamaptaaan dan beladiri	keg	0	1 keg	48.000	1 keg	69.600	1 keg	76.560	1 keg	84.216	1 keg	92.638	5 keg	371.014	SATPOL PP
31	Pelatihan Simulasi Personil Pencegahan dan Pemadam Kebakaran	org	0	50 org	49.642	50 org	63.791	50 org	95.686	50 org	143.529	50 org	157.882	250 org	510.530	SATPOL PP
32	Diklat PNS	org	0	0	0	2 org	179.000	2 org	205.850	2 org	236.728	2 org	272.237	8 org	893.814	SATPOL PP
33	Diklat Dasar Pol PP	org	0	0	0	2 org	85.000	2 org	97.750	2 org	112.413	2 org	129.274	8 org	424.437	SATPOL PP
34	Mengikuti HUT Linmas dan Satpol PP di Provinsi	keg	0	0	0	1 keg	170.878	1 keg	196.511	1 keg	225.988	1 keg	259.886	4 keg	853.265	SATPOL PP
35	Pembuatan Kartu Anggota Satpol PP	buah	0	166 buah	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	166 buah	3.000	SATPOL PP
G Program Peningkatan Pemeliharaan Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal																
36	Operasional dan Peningkatan Kualitas Kerja Satuan Polisi Pamong Praja	bln	828.000	12 bln	2.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 bln	3.038.000	SATPOL PP
37	Operasional Pelaksanaan Penertiban Penegakan Produk Hukum Daerah	bln	0	12 bln	205.516	12 bln	305.466	12 bln	336.012	12 bln	396.613	12 bln	406.575	60 bln	1.623.182	SATPOL PP
38	Operasional Patwal dan Patroli	bln	0	12 bln	54.888	12 bln	177.420	12 bln	195.162	12 bln	214.678	12 bln	236.146	60 bln	878.294	SATPOL PP



SATPOL PP KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

39	Operasional Pengamanan Hari-Hari Besar, event tertentu dan unjuk rasa		keg	0	2 keg	84.576	2 keg	123.136	2 keg	135.450	2 keg	148.995	2 keg	163.894	10 keg	656.050	SATPOL PP
40	Operasi Kasih Sayang		bln	0		0	12 bln	115.360	12 bln	126.896	12 bln	139.586	12 bln	153.544	48 bln	535.386	SATPOL PP
41	Operasi Picket Pengamanan Aset-aset Penting Daerah		bln	0		0	12 bln	450.000	12 bln	517.500	12 bln	569.250	12 bln	626.175	48 bln	2.162.925	SATPOL PP
42	Rekrutmen Tenaga Kontrak Banpol PP		org	0	100 org	101.617		0		0		0		0	100 org	101.617	SATPOL PP
43	Pengadaan dan pengurusan Ijin Senjata Api/amunisi		paket	0	1 paket	87.000		0	1 paket	113.100	1 paket	130.065	1 paket	149.575	4 Paket	479.740	SATPOL PP
44	Operasional Pengamanan Festival Danau Toba		keg	0	1 keg	104.174		0		0		0		0	1 keg	104.174	SATPOL PP
45	Operasional Pengamanan Marathon Humbang Lake		keg	0	1 keg	62.060		0		0		0		0	1 keg	62.060	SATPOL PP
46	Penyusunan Ranperda di Bidang Trantibum		Draft	0		0	1 Draft	88.697		0		0		0	1 Draft	88.697	SATPOL PP
47	Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Daerah di Bidang Trantibum		keg	0		0		0	1 Perda	100.000	2 Perda	230.000		0	3 Perda	330.000	SATPOL PP
48	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Satpol PP (Dalmas, Patwal)		unit	0		0	2 unit	800.000		0		0	4 unit	2.000.000	6 unit	2.800.000	SATPOL PP
H	Program Peningkatan Pemerantasan Penyakit Masyarakat																
49	Operasi Terpadu Pemerantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)		kali	0	3 kali	100.000	4 kali	61.560	5 kali	88.320	6 kali	125.000	6 kali	143.750	24 kali	518.630	SATPOL PP



SATPOL PP KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

I Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat																	
50	Pembentukan dan Pelatihan Anggota Linmas		org	0		0		650.000		0		0		0	2/desa	650.000	SATPOL PP
51	Apel Siaga Satlinmas		kali	0		0	2 kali	146.263		0		0		0	2 kali	146.263	SATPOL PP
52	Pelatihan Bantuan Relawan Pemadam Kebakaran (BALAKAR)		org	0		0	308 org	90.000		0		0		0	308 org	90.000	SATPOL PP
53	Pembangunan Pos Siskamling		unit	0	4 unit	100.000	4 unit	115.000	4 unit	132.250	4 unit	152.088	4 unit	174.901	20 unit	674.238	SATPOL PP
J Program Pencegahan Dini dan Pemadaman Kebakaran																	
54	Operasional dan Peningkatan Kualitas Kerja Petugas Pemadam Kebakaran		bln	554.000	12 bln	1.121.400		0		0		0		0	24 bln	1.675.400	SATPOL PP
55	Operasi Penanganan Bencana Kebakaran		bln	0		0	12 bln	200.000	12 bln	230.000	12 bln	264.500	12 bln	304.175	48 bln	998.675	SATPOL PP
56	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Pemadam Kebakaran		paket	99.968	1 Paket	198.839	1 Paket	180.295	1 Paket	322.000	1 Paket	370.300	1 Paket	425.845	6 Paket	1.597.247	SATPOL PP
57	Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran		unit	0		0	1 unit	1.850.000	1 unit	2.127.500	1 unit	2.446.625	1 unit	2.813.619	4 unit	9.237.744	SATPOL PP
58	Pembangunan Pos Wilayah Manajemen di Kecamatan di Kecamatan		WMK	792.865	1 WMK	200.000	1 WMK	200.000	2 WMK	230.000	3 WMK	1.050.000	2 WMK	608.350	10 WMK	3.081.215	SATPOL PP
59	Pengadaan APAR		buah	0		0	80 buah	115.132		0	80 buah	149.672	80 buah	172.122	240 buah	436.926	SATPOL PP
60	Fasilitasi Pencegahan Dini Bahaya Kebakaran		keg	0		0	1 keg	110.568		0	1 keg	150.000		0	2 keg	260.568	SATPOL PP



61	Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran		kec	0		0		0	2 kec	96.800	3 kec	170.000	3 kec	195.500	8 kec	462.300	SATPOL PP
62	Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran		unit	0		0	1 unit	1.837.500	1 unit	2.113.125	1 unit	2.430.094	1 unit	2.794.608	4 unit	9.175.327	SATPOL PP
63	Pemeliharaan Mobil Pemadam Kebakaran		bln	0		0	12 bln	530.452	12 bln	610.020	12 bln	701.523	12 bln	1.052.284	48 bln	2.894.279	SATPOL PP
64	Pembangunan Hydrant dan Bak Penampungan Air di Pos WMK		bak	0		0	1 bak	160.500	1 bak	184.575	1 bak	250.000	1 bak	239.948	4 bak	835.023	SATPOL PP
65	Pengadaan Pompa Portable		unit	0	2 unit	30.000	1 unit	187.250		0	1 unit	215.338		0	4 Unit	432.588	SATPOL PP
66	Rekrutmen Tenaga Kontrak Pemadam Kebakaran		org	74.971		0		0	30 org	110.000	50 org	150.000		0	182 org	334.971	SATPOL PP



BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Indikator yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Misi 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tujuan	:	1. Mendapatkan Kepercayaan Masyarakat dan Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban
Sasaran	:	1. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan 2. Meningkatnya kenyamanan masyarakat dan lingkungan; 3. Terlindunginya masyarakat dari bahaya kebakaran.
Indikator Kinerja dalam Renstra		1. Persentase Penegakan Perda; 2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan). 3. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat; 4. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota 5. Tingkat Waktu Tanggap (<i>Respon Time Rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran.
Program Pendukung		1. Program Pencegahan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal 2. Program Pencegahan Dini dan Pemadaman Kebakaran



Penetapan Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Tahun 2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021	Sumber Data
			2017	2018	2019	2020	2021		
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
5.1.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	0	0	2/desa	4/desa	6/desa	1/dusun	1/dusun	Satpol PP
5.2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	0	0	50%	60%	70%	80%	80%	Satpol PP
5.3.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	10%	10%	40%	50%	60%	80%	80%	Satpol PP
5.4.	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	60%	60%	60%	70%	75%	80%	80%	Satpol PP
5.5.	Persentase Penegakan Perda	50%	50%	60%	65%	75%	80%	80%	Satpol PP



BAB VII PENUTUP

Dokumen Renstra Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 ini disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Dalam perumusannya, disusun dengan mengacu pada RPJM-D Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021. Renstra Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan ini, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan-kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang (2016-2021). Sasaran, program dan kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut dalam satu kinerja tahunan. Renstra ini juga merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan.

Demikianlah Renstra Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 - 2021 disusun, sebagai implemetasi dari dokumen ini perlu komitmen bersama dari seluruh pihak baik internal maupun external Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan. Keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan tidak terlepas dari perencanaan yang baik. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan dan pihak-pihak terkait sangatlah diharapkan sehingga pada gilirannya Visi Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan akan terwujud pada khususnya dan Visi Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai Humbang Hasundutan yang Hebat dan Bermentalitas Unggul pada umumnya.

Doloksanggul, Agustus 2018

Plt. **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**



**Drs. RIKKY HILMAN SIHITE
PEMBINA TK. I
NIP. 19661224 198603 1 002**



Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2016													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satpol PP				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
ii	Meningkatnya Pelayanan Tindak Penyelamatan dan Evakuasi Korban/Terdampak Kebakaran	1	Pembentukan dan Pelatihan Anggota Linmas	Terlaksananya Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Linmas		-	308 org	650,000,000								1/desa	650,000,000	Satpol PP	
		2	Pembentukan Anggota Satlinmas	Terlaksananya Pembentukan Anggota Satlinmas		-	308 org	146,263,000									1/desa	146,263,000	Satpol PP
		3	Pelatihan Bantuan Relawan Pemadam Kebakaran (BALAKAR)	Tersedianya Relawan BALAKAR di setiap desa		-	308 org	90,000,000									308	90,000,000	Satpol PP
		4	Pembangunan Pos Siskamling	Terlaksananya Pembangunan Siskamling		4	100,000,000	4 Unit	115,000,000	4 Unit	132,250,000	4 Unit	152,087,500	4 Unit	174,900,625	20	674,238,125	Satpol PP	
		1	Program Pencegahan Dini dan Pemadam Kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai SOP															Satpol PP
			Peningkatan Kualitas Kerja Petugas Pemadam Kebakaran	Jumlah petugas damkar		48	1,121,400,000										48	1,121,400,000	Satpol PP
			Operasi Penanganan Bencana Kebakaran	Lancarnya Penanganan Bencana Kebakaran			-	12 bin	200,000,000	12 bin	230,000,000	12 bin	264,500,000	12 bin	304,175,000	48	998,675,000	Satpol PP	
			Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Pemadam Kebakaran	Jumlah pengadaan peralatan/perlengkapan		1	198,839,459	1 Paket	180,295,000	1 Paket	322,000,000	1 Paket	370,300,000	1 Paket	425,845,000	6	1,497,279,459	Satpol PP	
			Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran	Tersedianya peralatan/perlengkapan pemadam kebakaran			-	1 unit	1,850,000,000	1 unit	2,127,500,000	1 unit	2,446,625,000	1 unit	2,813,618,750	4	9,237,743,750	Satpol PP	
			Pembangunan Pos Wilayah Manajemen di Kecamatan di Kecamatan	Jumlah pengadaan mobil damkar		1	200,000,000	1 WMK	200,000,000	2 WMK	230,000,000	3 WMK	1,050,000,000	2 WMK	608,350,000	10	2,288,350,000	Satpol PP	
			Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Jumlah pengadaan APAR			-	80 buah	115,132,000			-	80 buah	149,671,600	80	172,122,340	240	436,925,940	Satpol PP
			Fasilitasi Pencegahan Dini Bahaya Kebakaran	Terlaksananya penyuluhan bahaya kebakaran dan antisipasi pencegahannya			-	1 keg	110,568,000			-	1 keg	150,000,000			2	260,568,000	Satpol PP
			Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran	Tersedianya peta daerah rawan kebakaran			-	2			2	96,800,000	3	170,000,000	3	195,500,000	8	462,300,000	Satpol PP
			Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran	Jumlah pengadaan mobil damkar			-	1	1,837,500,000	1	2,113,125,000	1	2,430,093,750	1	2,794,607,813	4	9,175,326,563	Satpol PP	
			Pemeliharaan Mobil Pemadam Kebakaran	Jumlah mobil damkar yang dipelihara			-	1	530,452,000								1	530,452,000	Satpol PP
			Pembangunan Hydrant dan Bak Penampungan Air di Pos WMK	Jumlah Pos WMK			-	1	160,500,000	1	184,575,000	2	250,000,000	1	239,947,500	5	835,022,500	Satpol PP	
			Pengadaan Pompa Portable	Jumlah pengadaan pompa		2	30,000,000	1	187,250,000				1	215,337,500			4	432,587,500	Satpol PP
	Rekrutmen Tenaga Kontrak Pemadam Kebakaran	Jumlah tenaga petugas pemadam kebakaran			-	-			30	110,000,000	50	150,000,000			80	260,000,000	Satpol PP		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satpol PP		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
4 Unsur Penunjang	5 Meningkatnya efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan administrasi		Sistem administrasi pendukung dan kearsipan lebih tertib															Satpol PP	
		Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana administrasi, aset, dokumen-dokumen dan fasilitas lainnya																Satpol PP
		1	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat (Jasa)		1	2,850,000										1	2,850,000	Satpol PP
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah peneediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		4	33,842,000	4	32,400,000	4	37,260,000	4	42,849,000	4	49,276,350	20	195,627,350	Satpol PP	
		3	Penyediaan Bahan Bacaan, Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan Bahan Bacaan, Peraturan dan Perundang-undangan			-	1	12,000,000	1	13,800,000	1	15,600,000	1	17,400,000	4	58,800,000	Satpol PP	
		4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang		16	6,977,388	16	12,952,216	16	14,895,048	16	17,129,306	16	19,698,702	80	71,652,660	Satpol PP	
		5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang terpenuhi		54	42,351,944	54	48,479,388	54	55,751,262	54	64,113,951	54	73,731,044	270	284,427,568	Satpol PP	
		6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi		4	33,845,512	4	26,300,000	4	30,245,000	4	34,781,750	4	39,999,013	20	165,171,275	Satpol PP	
		7	Listrik/Penerangan	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan		7	9,375,225	7	9,375,225	7	10,781,509	7	12,398,735	7	14,258,545	35	56,189,239	Satpol PP	
		8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang terpenuhi		5	80,236,000	5	52,400,000	5	60,260,000	5	69,299,000	5	79,693,850	25	341,888,850	Satpol PP	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		100	239,778,000	100	239,778,000	95	275,744,700	98	317,106,405	110	364,672,366	503	1,437,079,471	Satpol PP	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya rapat-rapat ke dalam daerah		1,065	305,000,000	1,066	303,610,000	1,030	349,151,500	180	401,524,225	185	461,752,859	3526	1,821,038,584	Satpol PP	
			Penyediaan Jasa Administrasi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Dokumen Keuangan			-	6	11,400,000	6	13,110,000	6	15,076,500	6	17,337,975	24	56,924,475	Satpol PP	
			Operasional Petugas Satpol PP dan Petugas Damkar	Jumlah petugas Satpol PP dan Petugas Damkar			-	180	3,931,200,000	180	4,520,880,000	180	5,199,012,000	180	5,978,863,800	720	19,629,955,800	Satpol PP	
		9	Extrafooding Petugas Damkar	Jumlah Petugas Damkar			-	47	436,200,000	47	501,630,000	47	576,874,500	47	663,405,675	188	2,178,110,175	Satpol PP	
			Program Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana															Satpol PP
		1	Pemeliharaan rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara		2	90,916,250	2	20,000,000	4	23,000,000	5	26,450,000	5	30,417,500	18	190,783,750	Satpol PP	
			Pemeliharaan rutin/ Berkala kendaraan dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		5	550,000,000	5	59,000,000	5	67,850,000	5	78,027,500	5	89,731,625	25	844,609,125	Satpol PP	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara		20	36,155,000	5	5,000,000	5	5,750,000	5	6,612,500	5	7,604,375	40	61,121,875	Satpol PP	
			Pengadaan Peralatan/Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan/perlengkapan		1	250,000,000	1	196,880,000	1	226,412,000	1	260,373,800	1	299,429,870	5	1,233,095,670	Satpol PP	
	Pengadaan Perlengkapan Mess Pemadam Kebakaran dan Pos Jaga Satpol PP	Jumlah penyediaan perlengkapan mess dan pos jaga		1	110,000,000	1	73,920,000	1	85,008,000	1	97,759,200	1	112,423,080	5	479,110,280	Satpol PP			
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Kasat Pol PP	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 4			-	-	-	1	450,000,000	-	-	-	-	1	450,000,000	Satpol PP			
3	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	Jumlah kendaraan dinas		2	65,000,000	4	150,000,000	2	84,500,000	2	97,175,000	2	111,751,250	0	508,426,250	Satpol PP			
Total Pendanaan pada Program dan Kegiatan						6,516,397,705		13,315,492,893		13,984,718,772		17,057,965,450		17,413,998,609		68,288,573,429			

PIH KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,



Drs. RIKKY HILMAN SIHITE.
PEMBINA TK.I
NIP. 19661224 198603 1 002